PENYUSUNAN PROYEKSI KEBUTUHAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2017

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah merupakan bahan acuan dalam mengembangkan kompetensi kepala sekolah/madrasah.

Kepala sekolah/madrasah pada hakekatnya merupakan figur sentral dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik pada level individu, kelompok, kelas, satuan pendidikan, wilayah binaan maupun nasional.Kebutuhan penyusunan proyeksi pengangkatan kepala sekolah/madrasah secara nyata memerlukan pendataan yang cermat dan akurat terkait dengan berbagai variabel penentunya.

Salah satu upaya untuk memperoleh hasil perhitungan proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah antara lain dilakukan dengan jalan menyusun petunjuk pelaksanaan perhitungan proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah. Petunjuk pelaksanaan ini berisi: (I) Pendahuluan; (II) Metode penyusunan proyeksi pengangkatan kepala sekolah/ madrasah; (III) Data dasar proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah; dan (IV) Penutup.

Agar proyeksi penyusunan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah dipahami oleh berbagai pihak yang terkait, maka petunjuk pelaksanaan ini perlu dikaji secara lebih seksama, disosialisasikan, dan di evaluasi efektivitasnya.Terima kasihkepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Semoga bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Jakarta,Juli 2017
Direktur Jenderal

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 3
C. Tujuan 4
D. Sasaran 4
E. Hasil yang Diharapkan 4
BAB II 5
METODE PENYUSUNAN PROYEKSI KEBUTUHANPENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 5
A. Jumlah Sekolah/Madrasah Berdasarkan Jenis atau Jenjang Sekolah/Madrasah 5
B. Proyeksi Penambahan dan Pengurangan Sekolah/Madrasah 6
C. Proyeksi Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 6
1. Berhenti Atas Permohonan Sendiri (X_1) 6
2. Masa Penugasan Berakhir (X_2) 7
3. Mencapai Batas Usia Pensiun (X_3) 8
4. Diangkat pada Jabatan Lain (X_4) 9
5. Dikenakan Hukuman Disiplin (X_5) 10
6. Dinilai Berkinerja Kurang (X_6) 11
7. Berhalangan Tetap (X_7) 12
8. Tugas Belajar (X_8) 13
9. Meninggal Dunia (X_9) 13
D. Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah 15
BAB III 16
PENYAJIAN DATA DASAR PROYEKSIKAN KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 16
A. Jumlah Sekolah/Madrasah Menurut Jenis atau Jenjang Sekolah/Madrasah 16
B. Penambahan dan Pengurangan Sekolah/Madrasah 16
C. Data Dasar Proyeksi Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah 17
1. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah yang Berhenti Atas Permohonan Sendiri 17
2. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah Menurut Masa Penugasan 17
3. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun 18
4. Diangkat pada Jabatan Lain 18
5. Dikenakan Hukuman Disiplin 18
6. Dinilai Berkinerja Kurang 18
7. Berhalangan Tetap 18
8. Tugas Belajar 18
9. Meninggal Dunia 18

D. Menghitung Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah 18
BAB IV 20
PENUTUP 20
LAMPIRAN-1 21
FORMAT USULAN KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 21
USULAN KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 21
LAMPIRAN-2 21
CONTOH MENGHITUNG PROYEKSI KEBUTUHAN 21
USULAN KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mencapai kemajuan bangsa.Suyanto (2003:3) menyatakan bahwa seorang presiden negara paling maju di duniamengakui bahwa investasi dalam pendidikan merupakan hal yang penting bagi kemajuan bangsa.*"As a nation, we now invest more in education than in defense".* Oleh karena itu, di era global seperti saat ini, manakala pemerintahkurang mempedulikan pembangunan sektor pendidikan secara serius dan berkelanjutan, mudah diprediksi bahwa pemerintahan negara itu dalam jangka panjang justru akan menjebak mayoritas rakyatnya memasuki dunia keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan (Suyanto, 2000: 3).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara yuridis diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan harus disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran tersebut, peserta didik aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakapkreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Pendidikan di Indonesia diselenggarakanmelalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda-beda. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jumlah satuan pendidikan(Sekolah Luar Biasa, Taman Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di lingkup kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama), program apa yang ditawarkan, berapa banyak peserta didik, berapa rombongan belajar, serta berapa jumlah guru yang ada menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan berapa banyak perlu diangkat kepala sekolah/madrasah.

Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya kualitas pendidikan, faktor utamanya adalah manajemen sekolah/madrasah.Kepala sekolah/madrasah mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai efektivitas dan efisiensi proses pendidikan di sekolah/madrasah. Dalam rangka pembinaan kepala sekolah/madrasah, pemerintah telah menetapkan standar kompetensi kepala sekolah/madrasah yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 13 Tahun 2007 dan peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 28 Tahun 2010.

Di era otonomi daerah, penyiapan, pengangkatan, pemberdayaan dan pemberhentian kepala sekolah/madrasah dan pengawas menjadi kewenangan kepala daerah (Bupati dan Walikota). Dalam upaya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pembinaan kepala sekolah/madrasah, khususnya pada aspek perencanaannya, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaanini selanjutnya dinamakan **Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah/Madrasah**.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 Tentang Guru.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Kepala LAN No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Fungsional;
19. Peraturan Kepala LAN No. 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabfung WI;
20. Peraturan Kepala LAN No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara.
21. Permendikbud nomor 17 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

C. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan inibertujuan untuk memandu unsur dinas pendidikan,unsur kantor kementerian agama kabupaten/kota, unsur dinas pendidikan dan unsur kantor wilayah kementerian agama provinsidi Indonesia dalam menyusun proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

D. Sasaran

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota.

E. Hasil yang Diharapkan

Setelah mempelajari petunjuk pelaksanaan ini unsur dinas pendidikan dan unsur kantor kementerian agama kabupaten/kota, serta unsur dinas pendidikan dan unsur kantor wilayah kementerian agama provinsi di Indonesia dapat menyusun proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

BAB II

METODE PENYUSUNAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENGANGKATANKEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasahdi suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi) didasarkan pada formasi yang ada, yang ditentukan oleh banyaknya satuan pendidikan yang memerlukannya tetapi belum terdapat kepala sekolah/madrasah yang*d efinitif*. Proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasahdapat dibuat berdasarkan banyaknyasekolah/madrasah yang ada, sekolah/madrasah tambahan baru untuk dua tahun ke depan, dan banyaknya sekolah/madrasah yang *re-grouping*, sehingga jumlah sekolah/madrasah menjadi berkurang, dikurangi dengan jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada, dangan memperhitungkan pengurangan kepala sekolah/madrasah yang disebabkan oleh(1) berhenti atas permohonan sendiri, (2) masa penugasan berakhir, (3) mencapai batas usia pensiun, (4) diangkat pada jabatan lain, (5) dikenakan hukuman disiplin, (6) dinilai berkinerja kurang, (7) sakit atau berhalangan tetap, (8) tugas belajar, dan (9) meninggal dunia.

Proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasahdibuatuntuk dua tahun ke depan setelah tahun berjalan. Pada tahun berjalan (*n*) dibuat proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah untuk tahun *n*+1 dan *n*+2, sedangkan pada tahun *n*+2 (misalkan *n*+2=*m*) akan dibuat proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasahuntuk tahun *m*+1 dan *m*+2 dan seterusnya. Sebagai contoh: pada tahun 2011 dibuat proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah untuk tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2013 dibuat proyeksi kebutuhan kepala sekolah/madrasah untuk tahun 2014 dan 2015, dan seterusnya.

A. Jumlah Sekolah/Madrasah Berdasarkan Jenis atau Jenjang Sekolah/Madrasah

Dalam memproyeksikan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasahunsur dinas pendidikan atau unsur kantor kementerian agama kabupaten/kota perlu memiliki data yang akurat tentang jumlah sekolah/madrasah berdasarkan jenis atau jenjang sekolah/madrasah di kabupaten/kota pada tahun *n*(tahun berjalan).

B. Proyeksi Penambahan dan Pengurangan Sekolah/Madrasah

Dalam memproyeksikan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasahunsur dinas pendidikan atau unsur kantor kementerian agama kabupaten/kota perlu memiliki data yang akurat tentang **rencana** penambahan sekolah/madrasah baru dalam kurun waktudua tahun mendatang. Data ini akan menentukan jumlah sekolah/madrasah dan proyeksi jumlah kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah untuk **dua** tahun mendatang. Pertambahan jumlah kepala sekolah/madrasah sama dengan jumlah sekolah/madrasah tahun *n*(tahun berjalan) ditambah dengan penambahan sekolah/madrasah baru pada tahun (*n*+1) dan (*n*+2). Selain adanya penambahan sekolah/madrasah, di mungkinkan juga ada sekolah/madrasah yang *re-grouping* atau berhenti beroperasi, ini berarti berpengaruh pada berkurangnya jumlah kepala sekolah/madrasah.

C. Proyeksi Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

Pemberhentian kepala sekolah/madrasah dapat disebabkan oleh: (1) berhenti atas permohonan sendiri, (2) masa penugasan berakhir, (3) mencapai batas usia pensiun, (4) diangkat pada jabatan lain, (5) dikenakan hukuman disiplin, (6) dinilai berkinerja kurang, (7) sakit atau berhalangan tetap, (8) tugas belajar, dan (9) meninggal dunia.

Proyeksi atau asumsi atas pemberhentian kepala sekolah/madrasah dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Berhenti Atas Permohonan Sendiri(X_1)

   Jumlah kepala sekolah/madrasah yang berhenti atas permohonan sendiri dalam kurun waktu dua tahun terakhir dapat dijadikan sebagai data dasar untuk memprediksi banyaknya kepala sekolah/madrasah yang berhenti atas permohonan sendiri untuk kurun waktu dua tahun yang akan datang.Kasus berhenti atas permohonan sendiri sangat sedikit, oleh karena itu diasumsikan sekitar 0 sampai dengan 1% dari jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada.(Lihat Tabel 2.1)

Tabel 2.1
JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
Total		

2. Masa Penugasan Berakhir (X_2)

Masa penugasan diperlukan untuk mengetahui jumlah kepala sekolah/madrasah yang akan diberhentikan dari penugasan karena masa penugasannya berakhir. Dalam hal ini seorang kepala sekolah/madrasah dimungkinkan untuk diangkat dalam 3 (tiga) periode masa penugasan, dengan ketentuan setiap akhir masa penugasan periode kesatu dan kedua diadakan penilaian kinerja per periode.Jika pada akhir masa penugasan periode pertama, sekurang-kurangnya berkinerja baik, maka kepala sekolah/madrasah dapat ditugaskan kembali untuk masa penugasan periode kedua.Jika pada akhir masa penugasan periode kedua, kepala sekolah/madrasah memiliki kinerja istimewa, maka dapat ditugaskan kembali untuk masa penugasan periode ketiga.Kepala sekolah/madrasah yang memasuki masa penugasan tahun keempat pada periode kesatu dan kedua dinilai kinerjanya. Data tentang jumlah kepala sekolah/madrasah yang tidak dapat ditugaskan kembali pada penugasan periode kedua diasumsikan 2% dari jumlah kepala sekolah/madrasah pada periode pertama.Data tentang jumlah kepala sekolah/madrasah yang tidak dapat ditugaskan kembali pada penugasan

periode ketiga diasumsikan sekitar 80% dari jumlah kepala sekolah/madrasah pada periode kedua.(Lihat Tabel 2.2).

Tabel 2.2

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG TIDAK BISA DIPERPANJANG MASA TUGASNYA BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA EMPAT TAHUNAN
KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	KEPALA SEKOLAH/MADRASAH	AKHIR MASA TUGAS *n*						TOTAL (Pbl 1+Pbl 2)
		Periode 1			Periode 2			
		Jumlah 1	2 %	Pbl 1	Jumlah 2	80 %	Pbl 2	
1	TK							
2	TKLB							
3	SD							
4	SDLB							
5	MI							
6	SMP							
7	SMPLB							
8	MTs							
9	SMA							
10	SMALB							
11	MA							
12	SMK							
13	MAK							
Jumlah								

Keterangan: Pbl = pembulatan

3. Mencapai Batas Usia Pensiun (X_3)

   Data kepala sekolah/madrasah yang telah mencapai usia 58 dan 59 tahun diperlukan untuk mengetahui jumlah kepala sekolah/madrasah yang akan diberhentikan dari penugasan karena mencapai batas usia pensiun pada tahun (n+1) dan tahun (n+2). (Lihat Tabel 2.3)

Tabel 2.3

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG AKAN MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN
KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	KEPALA SEKOLAH/MADRASAH	USIA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH		TOTAL
		Usia 58	Usia 59	
1	TK			
2	TKLB			
3	SD			
4	SDLB			
5	MI			
6	SMP			
7	SMPLB			
8	MTs			
9	SMA			
10	SMALB			
11	MA			
12	SMK			
13	MAK			
Jumlah				

4. Diangkat pada Jabatan Lain (X_4)

   Seorang kepala sekolah/madrasahdapat diangkatmenjadi pengawas sekolah/madrasah atau jabatan lain. Data tentang jumlah kepala sekolah/madrasah yang diangkat dalamjabatan lain dalam kurun waktu dua tahun terakhir,dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kepala sekolah/madrasah yang akan diangkat pada kurun waktu 2 (dua) tahun yang akan datang. (Lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4
JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG DIANGKAT PADA JABATAN LAIN MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	

2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
Total		

5. Dikenakan Hukuman Disiplin (X_5)

   Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh kepala sekolah/madrasahjarang terjadi, oleh karena itu, data tentang jumlah kepala sekolah/madrasah yang diberhentikan karena mendapat hukuman disiplin angkanya diasumsikan sekitar 0 sampai dengan 1% dari jumlah kepala sekolah/madrasahyang ada.(Lihat Tabel 2.5)

Tabel 2.5
JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	

6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
Total		

6. Dinilai Berkinerja Kurang(X_6)

Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap empat tahun.Hasil penilaian kinerja digunakan untuk menentukan apakah seorang kepala sekolah/madrasah layak atau menyelesaikan masa penugasannya.Kepala sekolah/madrasah yang diberhentikan karena berkinerja kurang diasumsikan 0 sampai dengan 1% dari jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada.(Lihat Tabel 2.6)

Tabel 2.6
JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG DINILAI BERKINERJA KURANG MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	

9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
Total		

7. Berhalangan Tetap(X_7)

Berhalangan tetap karena berbagai alasan yang menyebabkan seorang kepala sekolah/madrasah tidak dapat lagi untuk menjalankan tugas sebagai kepala sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah yang diberhentikan karena berhalangan tetap diasumsikan 0 sampai dengan 1% dari jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada.(Lihat Tabel 2.7).

Tabel 2.7
JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG BERHALANGAN TETAP MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
Total		

8. Tugas Belajar (X_8)

Kepala sekolah/madrasah yang mendapat tugas belajar selama kurang dari 6 bulan dapat menunjuk pelaksana harian untuk menggantikansecara sementara. Namun bila tugas belajarnya lebih dari 6 bulan, maka seorang kepala sekolah/madrasah harus diberhentikan dan digantikan oleh kepala sekolah/madrasah baru. Apabila telah menyelesaikan tugas belajar dapat diangkat kembali dengan syarat apabila terdapat formasi kepala sekolah/madrasah yang sesuai.Kepala sekolah/madrasah yang diberhentikan karena melaksanakan tugas belajar diasumsikan 0 sampai dengan 1% dari jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada.(Lihat Tabel 2.8).

Tabel 2.8
JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG TUGAS BELAJAR MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	

9. Meninggal Dunia (X_9)

Kepala sekolah/madrasah yang meninggal dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir dapat dipergunakan untuk memprediksi angka kematian kepala sekolah/madrasah untuk dua tahun yang akan datang. Jika data tersebut belum ada, dapat diganti dengan angka prediksi kematian kepala sekolah/madrasah diperkirakan sekitar 0 sampai dengan 1% dari jumlah kepala sekolah/madrasahyang ada. (Lihat Tabel 2.9)

Tabel 2.9
JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG MENINGGAL DUNIA MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
Total		

Proyeksi data tentang jumlah kepala sekolah/madrasah yang berhenti dikelompokkan menurut alasan pemberhentian penugasan sebagai kepala sekolah/madrasah dalam dua tahun terakhir, data tersebut dapat digunakan untuk memproyeksikan penambahan jumlah kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasahuntuk tahun (*n*+1) dan (*n*+2). Proyeksi tersebut diklasifikasikan menurut jenis atau jenjang sekolah/madrasah, sehingga diperoleh data penambahan jumlah untuk jenis atau jenjangnya.

D. Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Berdasarkan hasil penghitungan dan data-data yang dihasilkan pada langkah A sampai dengan C, dapat dihitung proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah per jenjang sekolah/madrasah untuk 2 tahun ke depan berdasarkan jenis atau jenjang sekolah/madrasah untuk tahun (*n*+1) dan (*n*+2) dengan **rumus** sebagai berikut:

Rumus PKPKS

$$\textbf{PKPKS} = \sum_{i=1}^{2} Sb_i + \sum_{i=1}^{9} X_i$$

Keterangan:

PKPKS = Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/madrasah

$\sum_{i=1}^{2} Sb_i$ = Jumlah sekolah/madrasah baru pada tahun (*n*+1) dan (*n*+2)

$\sum_{i=1}^{9} X_i$ **=** Faktor pengurang jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada

$$\sum_{i=1}^{9} X_i = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9$$

n = tahun berjalan

BAB III

PENYAJIAN DATA DASAR PROYEKSI KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Penyajian data yang diperlukan untuk menghitung proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Jumlah Sekolah/Madrasah Menurut Jenis atau Jenjang Sekolah/Madrasah

Jumlah sekolah/madrasah berdasarkan jenis atau jenjang sekolah/madrasah di kabupaten/kota tertentu pada tahun *n* dituangkan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
JUMLAH SEKOLAH/MADRASAHMENURUT JENIS ATAUJENJANGSEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN .....

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
Total		

B. Penambahan dan Pengurangan Sekolah/Madrasah

Jumlah sekolah/madrasah yang dibangun tahun ini dan yang akan dibangun selama 2(dua) tahun yang akan datang (*n*+1) dan (*n*+2) dan kemungkinan adanya sekolah/madrasah yang *re-grouping* atau berhenti beroperasi menurut jenis atau

jenjangnya pada tahun *n*dan 2 (dua) tahun yang akan datang dituangkan pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

JUMLAH PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SEKOLAH/MADRASAHMENURUT JENIS ATAU JENJANG KABUPATEN/KOTA .....

No	Jenis/Jenjang Sekolah	Tahun (*n*+1)			Tahun (*n*+2)		
		Tambah	Kurang	Jumlah 1	Tambah	Kurang	Jumlah 2
1	TK						
2	TKLB						
3	SD						
4	SDLB						
5	MI						
6	SMP						
7	SMPLB						
8	MTs						
9	SMA						
10	SMALB						
11	MA						
12	SMK						
13	MAK						
Total							

Keterangan:
n+1 = satu tahun setelah tahun *n*
n+2 = dua tahun setelah tahun *n*

C. Data Dasar Proyeksi Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

1. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah yang Berhenti Atas Permohonan Sendiri. (Lihat tabel 2.1)
2. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah Menurut Masa Penugasan. (Lihat tabel 2.2)

3. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun. (Lihat tabel 2.3)
4. Diangkat pada Jabatan Lain. (Lihat tabel 2.4)
5. Dikenakan Hukuman Disiplin.(Lihat tabel 2.5)
6. Dinilai Berkinerja Kurang. (Lihat tabel 2.6)
7. Berhalangan Tetap. (Lihat tabel 2.7)
8. Tugas Belajar. (Lihat tabel 2.8)
9. Meninggal Dunia. (Lihat tabel 2.9)

D. Menghitung Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Menghitung kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menurutjenis atau jenjang sekolah/madrasah untuk dua tahun ke depan berdasarkan formula yang telah dikemukakan di atas. Hasilnya dapat dituangkan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

PROYEKSI KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH TAHUN (*n*+1) DAN (*n*+2)

No	Kepala Sekolah/Madrasah	Sb_i (i= 1, 2)		X_i (i = 1, 2, 3, ..., 9)										Jumlah	
		Sb_1	Sb_2	X_1	X_2	X_3 Th *n*+1	X_3 Th *n*+2	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	Real	Pbl
1	TK														

2	TKLB														
3	SD														
4	SDLB														
5	MI														
6	SMP														
7	SMPLB														
8	MTs														
9	SMA														
10	SMALB														
11	MA														
12	SMK														
13	MAK														
Total															

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan penyusunan proyeksi pengangkatan kepala sekolah/madrasah ini disusun sebagai acuan bagi dinas pendidikan/kantor kementerian agama wilayah/kabupaten/kota dalam menyusun proyeksi kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, yang telah dilengkapi dengan format penyajian data dasar yang diperlukan guna memproyeksikan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah; dan penggunaan data hasil proyeksi untuk dijadikan sebagai acuan untuk perekrutan, pengangkatan, pembinaan, mutasi, promosi jabatan guru, kepala sekolah/madrasah, serta acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan penyediaan anggarannya.

LAMPIRAN-1
FORMAT USULAN KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

USULANKEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Berdasarkan data dan hasil perhitungan kebutuhan pengangkatankepala sekolah/madrasah di kabupaten/kota .....pada tahun (*n*+1) - (*n*+2)diusulkan sebagai berikut:

DAFTAR USULAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH TAHUN (*n*+1) - (*n*+2)

No	Kepala Sekolah/Madrasah	Jumlah
1	TK	
2	TKLB	
3	SD	
4	SDLB	
5	MI	
6	SMP	
7	SMPLB	
8	MTs	
9	SMA	
10	SMALB	
11	MA	
12	SMK	
13	MAK	
	Total	

Diusulkan untuk dua tahun ke depan, yaitu tahun *n*+1 sampai dengan tahun *n*+2, diangkat sebanyak .... (....) kepala sekolah dengan rincian sebagai berikut: ... (....) orang kepala TK/SD, ... (....) orang kepala SMP/MTs, ... (....) orang kepala SMA/MA, dan .... (....) orang kepala SMK/MAK. Prediksi penempatan kepala sekolah/madrasah lihat daftar kepala sekolah/madrasah yang kosong yang disebabkan oleh disebabkan oleh permohonan sendiri, berakhir masa jabatan, pensiun, promosi, hukuman disiplin, tidak memenuhi standar kinerja kepala sekolah/madrasah, berhalangan tetap, tugas belajar, dan meninggal dunia atau karena alasan lain di Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota terkait.Daftar sekolah/madrasah yang kepala sekolah/madrasahnya perlu diangkat dalam dua tahun terakhir dapat dibuat berdasarkan laporan dan data-data yang terkini.

LAMPIRAN-2
CONTOH MENGHITUNG PROYEKSI KEBUTUHAN

PROYEKSI KEBUTUHAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
KOTA TUA TAHUN 2011

A. Data Dasar Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Diperoleh data sekolah/madrasah menurut jenis atau jenjang sekolah/madrasah sebagai berikut:

JUMLAH SEKOLAH/MADRASAH
MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH
DI KOTATUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah
1	TK	25
2	TKLB	15
3	SD	258
4	SDLB	38
5	MI	32
6	SMP	196
7	SMPLB	20
8	MTs	28
9	SMA	143
10	SMALB	5
11	MA	21
12	SMK	95
13	MAK	14
Total		**890**

B. Penambahan dan Pengurangan Sekolah/Madrasah

Pada tahun 2012 dan 2013 ada rencana penambahan jumlah sekolah/madrasah baru. Disamping itu, ada juga sekolah/madrasah yang akan melakukan *re-grouping*. Data penambahan dan pengurangan jumlah sekolah/madrasah diberikan sebagai berikut:

JUMLAH PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
SEKOLAH/MADRASAHMENURUT JENIS ATAU JENJANG
DI KOTATUATAHUN 2012-2013

No	Jenis/Jenjang Sekolah	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Tambah	Kurang	Jumlah 1	Tambah	Kurang	Jumlah 2
1	TK	4	3	1	4	2	2
2	TKLB				1		1
3	SD	5	2	3	4	2	2
4	SDLB					1	-1

No	Jenis/Jenjang Sekolah	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Tambah	Kurang	Jumlah 1	Tambah	Kurang	Jumlah 2
5	MI	2		2			
6	SMP	2		2	3	1	2
7	SMPLB				1		1
8	MTs		2	-2			
9	SMA				1	1	0
10	SMALB		1	-1			
11	MA	1		1	2		2
12	SMK	1	1	0			
13	MAK					1	-1
Total		**15**	**9**	**6 (=Sb_1)**	**16**	**8**	**8 (=Sb_2)**

C. Data Dasar Proyeksi Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

1. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah yang Berhenti Atas Permohonan Sendiri
   Diasumsikan, paling banyak 1% dari 890kepala sekolah/madrasahyang ada pada tahun 2011 berhenti sebagai kepala sekolah/madrasah atas permohonan sendiri.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA TUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	0.3
2	TKLB	0.2
3	SD	2.6
4	SDLB	0.4
5	MI	0.3
6	SMP	2.0
7	SMPLB	0.2
8	MTs	0.3
9	SMA	1.4
10	SMALB	0.1
11	MA	0.2
12	SMK	1.0
13	MAK	0.1
Total		**8,9**

Jadi, X_1 = 8,9; Pembulatan = **9**

2. Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah Menurut Masa Penugasan

Kolom “Jumlah 1” memuat data jumlah kepala sekolah/madrasahyang ada pada tahun keempat pada periode pertama yang sekurang-kurangnya berkinerja baik dan kolom “Jumlah 2” memuat data jumlah kepala sekolah/madrasahyang memiliki kinerja istimewa pada tahun keempat periode kedua. Diasumsikan maksimum 2% dari Jumlah 1 tidak dapat ditugaskan kembali pada periode kedua, dan 80% dari Jumlah 2 tidak dapat ditugaskan kembali pada periode ketiga. Pembulatan (Pbl) ke atas dilakukan pada setiap perhitungan karena angka di sini merepresentasikan orang, sehingga harus utuh.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG TIDAK BISA DIPERPANJANG MASA TUGASNYA BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA EMPAT TAHUNAN
DI KOTA TUATAHUN 2011

No	Kepala Sekolah/Madrasah	Akhir Masa Tugas 2011						Total (Pbl 1+Pbl2)
		Periode 1			Periode 2			
		Jumlah 1	2 %	Pbl 1	Jumlah 2	80 %	Pbl 2	
1	TK	30	0.6	1	7	5.6	6	7
2	TKLB	5	0.1	0	4	3.2	3	3
3	SD	32	0.64	1	3	2.4	2	3
4	SDLB	3	0.06	0	1	0.8	1	1
5	MI	30	0.6	1	6	4.8	5	6
6	SMP	7	0.14	0	6	4.8	5	5
7	SMPLB	3	0.06	0	8	6.4	6	6
8	MTs	2	0.04	0	7	5.6	6	6
9	SMA	3	0.06	0	1	0.8	1	1
10	SMALB	2	0.04	0	3	2.4	2	2
11	MA	3	0.06	0	1	0.8	1	1
12	SMK	3	0.06	0	3	2.4	2	2
13	MAK	2	0.04	0	2	1.6	2	2
Jumlah		125	2.5	3	52	41.6	42	45

Jadi, X_2 = 49; untuk ke periode 2 adalah 7 dan untuk ke periode 3 adalah 42.

3. **Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiun**

   Dari data sekolah/madrasah menurut jenis atau jenjang sekolah/madrasah diperoleh jumlah kepala sekolah/madrasah yang berusia 58 dan 59 tahun.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG AKAN MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN
DI KOTA TUATAHUN 2011

No	Kepala Sekolah/Madrasah	Usia Kepala Sekolah/Madrasah		Total
		Usia 58	Usia 59	
1	TK	16	54	70
2	TKLB	4	6	10
3	SD	18	21	39
4	SDLB	5	4	9
5	MI	7	8	15
6	SMP	8	3	11
7	SMPLB	1	3	4
8	MTs	4	5	9
9	SMA	2	1	3
10	SMALB	-	2	2
11	MA	4	1	5
12	SMK	4	5	9
13	MAK	1		1
Jumlah		**74**	**113**	**187**

Jadi, X_3 pada tahun 2012 adalah74 dan pada tahun 2013 adalah113. Total = 187

4. Diangkat pada Jabatan Lain

   Data jumlah kepala sekolah/madrasah yang diangkat pada jabatan lain dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2009 – 2010) digunakan untuk memprediksi jumlah kepala sekolah/madrasah yang akan diangkat pada jabatan lain pada kurun waktu 2012 – 1013.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG DIANGKAT PADA JABATAN LAIN MENURUT JENIS ATAU JENJANGSEKOLAH/MADRASAHDI KOTA TUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	-
2	TKLB	-
3	SD	3
4	SDLB	1
5	MI	1
6	SMP	-
7	SMPLB	1
8	MTs	-
9	SMA	1
10	SMALB	-
11	MA	1
12	SMK	1
13	MAK	-

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
Total		**9**

Jadi, $X_4 = 9$

5. Dikenakan Hukuman Disiplin
   Diasumsikan, paling banyak 1% dari 890 kepala sekolah yang ada pada tahun 2011diberhentikan sebagai kepala sekolah/madrasah karena mendapat hukuman disiplin.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAHDI KOTA TUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	0.3
2	TKLB	0.2
3	SD	2.6
4	SDLB	0.4
5	MI	0.3
6	SMP	2.0
7	SMPLB	0.2
8	MTs	0.3
9	SMA	1.4
10	SMALB	0.1
11	MA	0.2
12	SMK	1.0
13	MAK	0.1
Total		**8,9**

Jadi, $X_5 = 8,9$; Pembulatan = **9**

6. Dinilai Berkinerja Kurang
   Diasumsikan, paling banyak 1% dari 890kepala sekolah/madrasahyang ada pada tahun 2011diberhentikan sebagai kepala sekolah/madrasah karena berkinerja kurang.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG DINILAI BERKINERJA KURANG MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAHDI KOTA TUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah

1	TK	0.3
2	TKLB	0.2
3	SD	2.6
4	SDLB	0.4
5	MI	0.3
6	SMP	2.0
7	SMPLB	0.2
8	MTs	0.3
9	SMA	1.4
10	SMALB	0.1
11	MA	0.2
12	SMK	1.0
13	MAK	0.1
Total		**8,9**

Jadi, X_6 = 8,9; Pembulatan = **9**

7. Berhalangan Tetap

   Diasumsikan, paling banyak 1% dari 890kepala sekolah/madrasah yang ada pada tahun 2011diberhentikan sebagai kepala sekolah/madrasah karena berhalangan tetap.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG BERHALANGAN TETAP MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAHDI KOTA TUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	0.3
2	TKLB	0.2
3	SD	2.6
4	SDLB	0.4
5	MI	0.3
6	SMP	2.0
7	SMPLB	0.2
8	MTs	0.3
9	SMA	1.4
10	SMALB	0.1
11	MA	0.2
12	SMK	1.0
13	MAK	0.1
Total		**8,9**

Jadi, X_7 =8,9; Pembulatan = **9**

8. Tugas Belajar

Diasumsikan, paling banyak 1% dari 890kepala sekolah/madrasah yang ada pada tahun 2011diberhentikan sebagai kepala sekolah/madrasah karena tugas belajar.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG TUGAS BELAJAR MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAHDI KOTA TUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	0.3
2	TKLB	0.2
3	SD	2.6
4	SDLB	0.4
5	MI	0.3
6	SMP	2.0
7	SMPLB	0.2
8	MTs	0.3
9	SMA	1.4
10	SMALB	0.1
11	MA	0.2
12	SMK	1.0
13	MAK	0.1
Total		**8,9**

Jadi, X_8 = 8,9; Pembulatan = **9**

9. Meninggal Dunia

Diasumsikan, paling banyak 1% dari 890 kepala sekolah/madrasah yang ada pada tahun 2011 diberhentikan sebagai kepala sekolah/madrasah karena meninggal dunia.

JUMLAH KEPALA SEKOLAH/MADRASAH YANG MENINGGAL DUNIA MENURUT JENIS ATAU JENJANG SEKOLAH/MADRASAHDI KOTA TUATAHUN 2011

No	Jenjang Sekolah/Madrasah	Jumlah Kepala Sekolah/Madrasah
1	TK	0.3
2	TKLB	0.2
3	SD	2.6
4	SDLB	0.4
5	MI	0.3
6	SMP	2.0
7	SMPLB	0.2
8	MTs	0.3

9	SMA	1.4
10	SMALB	0.1
11	MA	0.2
12	SMK	1.0
13	MAK	0.1
Total		**8,9**

Jadi, X_9 = 8,9; Pembulatan = **9**

D. Menghitung Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Menghitung kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah menurut jenis atau jenjang sekolah/madrasah untuk dua tahun ke depan berdasarkan rumus **PKPKS** pada halaman 9. Hasilnya dapat dituangkan pada tabel 3.4.

Rumus **PKPKS** (Proyeksi Kebutuhan Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah)

$$\textbf{PKPKS} = \sum_{i=1}^{2} Sb_i + \sum_{i=1}^{9} X_i$$

$\sum_{i=1}^{2} Sb_i$ = Jumlah sekolah/madrasah baru pada tahun 2012 dan 2013

= $Sb_1 + Sb_2 = 6 + 8 = 14$

$\sum_{i=1}^{9} X_i$ **=** Faktor pengurang jumlah kepala sekolah/madrasah yang ada

$$\sum_{i=1}^{9} X_i = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6 + X_7 + X_8 + X_9$$

= 9 + 45 + 187 + 9 + 9 + 9+ 9 + 9 + 9

= **295**

$$\textbf{PKPKS} = \sum_{i=1}^{2} Sb_i + \sum_{i=1}^{9} X_i$$

= 14 + 295

= 309

PROYEKSI KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
TAHUN 2012 DAN 2013

No	Kepala Sekolah/ Madrasah	Sb_i (i= 1, 2)		X_i (i = 1, 2, 3, ..., 9)										Jumlah	
		Sb_1	Sb_2	X_1	X_2	X_3 Th n+1	X_3 Th n+2	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	real	Pbl
1	TK	1	2	0.3	7	16	54	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	81.8	82
2	TKLB	-	1	0.2	3	4	6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	15.1	15
3	SD	3	2	2.6	3	18	21	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	65.1	65
4	SDLB	-	-1	0.4	1	5	4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12.7	13
5	MI	2	-	0.3	6	7	8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	25.2	25
6	SMP	2	2	2.0	5	8	3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	33.7	34
7	SMPLB	-	1	0.2	6	1	3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12.4	12
8	MTs	-2	-	0.3	6	4	5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	15.0	15
9	SMA	-	0	1.4	1	2	1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	15.0	15
10	SMALB	-1	-	0.1	2	-	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4	3
11	MA	1	2	0.2	1	4	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11.5	12
12	SMK	0	-	1.0	2	4	5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	18.7	19
13	MAK	-	-1	0.1	2	1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.0	3
Total															313

Keterangan :

Pbl =Pembulatan

USULAN KEBUTUHAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Berdasarkan data dan hasil perhitungan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah/madrasah di Kota Tua pada tahun 2012 – 2013 diusulkan sebagai berikut:

DAFTAR USULAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2012 - 2013

No	Kepala Sekolah/Madrasah	Jumlah
1	TK	82
2	TKLB	15
3	SD	65
4	SDLB	13
5	MI	25
6	SMP	34
7	SMPLB	12
8	MTs	15
9	SMA	15
10	SMALB	3
11	MA	12
12	SMK	19
13	MAK	3
Total		**313**

Diusulkan untuk dua tahun ke depan, yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, diangkat sebanyak 313kepala sekolah/madrasah dengan rincian sebagai berikut: 82 (delapan puluhdua) orang kepala TK, 15 (lima belas) orang kepala TKLB, 65 (enam puluh lima) orang kepala SD, 13 (tiga belas) orang kepala SDLB,25 (dua puluh lima) orang kepala MI, 34(tiga puluh empat) orang kepala SMP, 12 (dua belas) orang kepala SMPLB,15 (lima belas) orang kepala MTs, 15 (lima belas) orang kepala SMA, 3 (tiga) orang kepala SMALB, 12 (dua belas) orang kepala MA, 19 (sembilan belas) orang kepala SMKdan 3 (tiga) orang kepala MAK. Prediksi penempatan kepala sekolah/madrasah lihat daftar kepala sekolah/madrasah yang kosong yang disebabkan oleh permohonan sendiri, berakhir masa jabatan, pensiun, promosi, hukuman disiplin, tidak memenuhi standar kinerja kepala sekolah/madrasah, berhalangan tetap, tugas belajar, dan meninggal dunia atau karena alasan lain di Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota terkait.Daftar sekolah/madrasah yang kepala sekolah/madrasahnya perlu diangkat dalam dua tahun terakhir dapat dibuat berdasarkan laporan dan data-data yang terkini.